

ABSTRAK

Impunitas dan sakralisasi kekerasan merupakan hasil (re)konstruksi sejarah atau historiografi rezim Orde Baru. Pola ini terbentuk sejak rezim Orde Baru mengambil alih kekuasaan dari Orde Lama lewat tragedi kemanusiaan 30 September 1965 dan memutarbalikkan fakta sejarah. Terciptalah norma negatif dalam tata kekuasaan di Indonesia. Pemerintahan transisi pasca tumbangannya rezim Orde Baru akhirnya terus mengidap ketidaksadaran untuk me(re)produksi kekerasan di masa yang akan datang dan membiarkannya beroperasi dalam ruang-ruang publik. Hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan identitas kemanusiaan rakyat Indonesia. Replikasi penggunaan kekerasan dan pendakuan kebenaran berdasarkan memutarbalikkan fakta sejarah kembali terjadi di Timor-Leste.

Sejak tahun 1975, memutarbalikkan fakta-fakta sejarah digunakan oleh Indonesia untuk mengkolonisasi Timor-Leste lewat kekuatan militer. Militer menjadi “alat paling ampuh” dalam mengoperasikan norma negatif. Sampai dengan kemerdekaannya pada Agustus 1999, Timor-Leste menjadi korban aktualisasi norma negatif rezim Orde Baru. Maka kekerasan dalam proses Jajak Pendapat 1999 di Timor-Leste kembali dilakukan oleh militer (Indonesia) yang berakibat pada pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat.

Maka, pengalaman masa lalu yang penuh pengalaman traumatis akibat pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat harus menjadi narasi yang bisa dibaca, ditafsir dan ditulis ulang dengan metode psikoanalisa dan dekonstruksi. Metode ini sangat penting agar sejarah atau historiografi bisa menjadi representasi bagi suara-suara para penyintas yang menuntut pengungkapan kebenaran harus diikuti dengan perwujudan keadilan. Testimoni lapis kedua dari para pekerja kemanusiaan JRS sangat fundamental bagi terbentuknya (politik) ingatan dalam penyelesaian pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat di Timor-Leste.

Pengalaman trauma dalam keterlibatan dengan para pengungsi dan penyintas di Timor-Leste menjadi bagian dari ingatan kolektif para pekerja kemanusiaan JRS. Pengalaman trauma membentuk identitas para pekerja kemanusiaan JRS sebagai *middle-voices* dalam memperjuangkan hak-hak para pengungsi dan penyintas dalam mengungkap kebenaran dan mewujudkan keadilan. Karenanya, testimoni lapis kedua menjadi “material berharga” untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi sejarah atau historiografi hegemonik dan manipulatif warisan rezim totaliter-otoriter Orde Baru. Selain itu, testimoni lapis kedua diharapkan bisa menjadi penanda (*signifiant*) dan sekaligus petanda (*signifie*) bagi terciptanya *the “other” history*. (**)

ABSTRACT

Impunity and sacralization of violence are results of (re)constructed history or historiography made by the New Order Regime. This pattern has been formed since the New Order Regime took over state power from the Old Order Regime through human carnage on 30 September 1965 and the twisted of historical facts. From then on, negative norm has been created within the system of power in Indonesia. The transition government who took over the power after the fall of the New Order Regime unconsciously (re)produce violence and let it infiltrates public spaces. This has threatened the continuity of Indonesian humanity. Violence and twisted historical facts replicated in East Timor.

Since 1975, Indonesia has twisted historical facts to legitimize its occupation over East Timor through military force. Military was “the most effective instrument” to carry out negative norm. Until its independence in August 1999, East Timor had been a victim of the negative norm execution by the New Order Regime. Violence post-1999 referendum in East Timor by Indonesian military forces has caused human right violation and severe crime against humanity.

Traumatic life experience caused by severe crime against humanity and human rights violation should be made into readable, interpretable, and rewritable narration using psychoanalysis and deconstruction methods. These methods usage aims to show that historiography can represent victims’ voices demand for justice and truth revelation. Second line testimonial from humanitarian actors, such as JRS staff, is fundamental for the formation of (political) memory in settling human rights violations and severe crime against humanity in East Timor.

Trauma experiences through direct involvement with East Timor refugees and survivors were being apart of collective memory of JRS staff. Trauma experiences created identity of JRS staff as middle-voices in fighting for the rights of the refugees and survivors for the sake of justice and truth revelation. Second line testimonial become “valuable material” to deconstruct and reconstruct hegemonic and manipulative history of totalitarian-authoritarian New Order Regime. Besides, the second-line testimony is expected to be *signifiant* and *signifie* to create the “other” history. (**)